



RELEVANSI KONSEP ETIKA POLITIK DALAM TEOLOGI ISLAM

Eka Zuliana¹⁾, Fathul Jannah²⁾

^{1), 2)} Universitas Alwashliyah Medan

¹ekazuliana1@gmail.com, ²fjannah8614@gmail.com

ABSTRAK

Bagi para pemikir politik, politik terkait erat dengan etika. Bedanya jika pemikir Yunani membicarakan keterkaitan itu dalam wilayah filsafat moral, sementara pemikir politik Islam mendiskusikan dalam naungan teologi. Konsep etika politik dalam teologi Islam berakar pada ajaran tauhid yang menempatkan Allah sebagai sumber segala kekuasaan. Manusia hanya bertindak sebagai khalifah yang bertanggung jawab mengelola kehidupan sesuai dengan ketentuan-Nya. Prinsip ini melahirkan berbagai nilai politik seperti amanah, keadilan, musyawarah, dan tanggung jawab sosial. Di era modern, ketika sistem politik menghadapi berbagai tantangan global, kajian mengenai relevansi etika politik dalam teologi Islam menjadi semakin penting. Nilai-nilai yang terkandung dalam teologi Islam dapat menjadi alternatif dalam membangun budaya politik yang berintegritas dan berkeadilan. Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkapkan, menganalisa, dan menjelaskan relevansi konsep etika politik dalam teologi Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library research*) yaitu dengan cara meneliti, membaca, dan memahami buku-buku yang berkenaan dengan judul penelitian tersebut. Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) atau analisis tekstual dan metode interpretasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan *normative* dan *socio-historis*. Penelitian ini tergolong penelitian deskriptif dengan melalui pendekatan kualitatif. Relevansi konsep Etika politik dalam teologi Islam, meliputi; *Pertama*, Sejarah kemunculan politik dalam yaitu di mulai saat Muawiyah tidak menerima pengangkatan Ali sebagai khalifah dan terjadilah peperangan antar keduanya yang dalam sejarah dikenal dengan perang Shiffin. Sebenarnya perseteruan tersebut dimenangkan oleh pihak Ali bin Abi Thalib. Tetapi sewaktu pasukan Muawiyah terdesak dan mulai tampak tanda-tanda kekalahan, Muawiyah meminta salah satu utusannya untuk meletakkan al-Quran diatas tombak, kemudian menunjukkannya kepada pasukan Ali dan meminta perdamaian atau tahkim. *Kedua*, Konsep etika politik dalam teologi Islam adalah seperangkat nilai moral dan prinsip keagamaan yang mengatur bagaimana kekuasaan diperoleh, dijalankan, dan dipertanggungjawabkan menurut ajaran Islam. *Ketiga*, Landasan dasar etika politik dalam teologi Islam, yaitu Tauhid, Khilafah, Amanah, Mas'uliyah (akuntabilitas). Prinsip-prinsip etika politik dalam teologi Islam, yaitu Keadilan (al-'adl), Musyawarah (syura), Persamaan (al-musawah), Kemaslahatan (maslahah), Kejujuran dan Integritas. *Keempat*, Etika politik dalam teologi Islam sangat relevan karena menjembatani antara keyakinan (akidah), nilai moral (akhlak), dan praktik kekuasaan (siyasah). Berikut beberapa poin utama relevansi etika politik dalam teologi Islam, yaitu: Politik sebagai bagian dari amanah moral, Keadilan sebagai prinsip teologis, Kekuasaan dibatasi oleh syariah dan nilai akhlak, Tanggung jawab pemimpin (khilafah), Koreksi terhadap penyalahgunaan agama dalam politik, Relevansi dalam konteks modern.

Kata kunci: Relevansi, Etika Politik, Teologi Islam



A. PENDAHULUAN

Politik merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia karena berkaitan dengan pengaturan kehidupan bersama. Dalam praktiknya, politik sering kali diwarnai oleh berbagai persoalan moral seperti korupsi, manipulasi kekuasaan, nepotisme, dan ketidakadilan. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa aktivitas politik tidak cukup hanya didasarkan pada aspek legal dan struktural, tetapi juga membutuhkan landasan etika yang kuat.

Menurut Yahya A. Muhaimin kehidupan demokratis paling tidak memerlukan sikap dan tindakan saling menghormati dan memerlukan penerapan etika politik termasuk disini ialah nilai-nilai budaya yang tertanam pada warga masyarakat. Aturan dan norma-norma ini berada pada posisi sentral untuk bias menyelesaikan pertentangan dan konflik kepentingan antar warga negara (Yahya A. Muhaimin, 1986).

Prinsip moral kemanusiaan itu sendiri sangat terkait dengan agama terutama dengan rasa ketuhanan. Rasa kemanusiaan hanya terwujud jika dilandasi rasa ketuhanan. Rasa kemanusiaan yang lepas dari rasa ketuhanan akan menyebabkan terjadinya praktik-praktik pemutlakan sesama manusia. Oleh sebab itu kemanusiaan sejati harus bertujuan pada keridhoan Tuhan semata. Orientasi keridhaan Tuhan ini merupakan landasan bagi peningkatan nilai-nilai kemanusiaan seseorang (Nurcholish Madjid, 2000).

Islam dan politik pada dasarnya tidak terpisahkan. Islam tidak pernah memisahkan antara kegiatan profan dan sakral, kecuali dalam cara pendekatannya, artinya liputan islam kepada segenap persoalan hidup, misalnya politik yang sebenarnya terjadi

terutama hanya pada level etisnya saja. Islam sedikit sedikit sekali memberikan ketentuan terperinci mengenai detail-detail berpolitik, yang dibiarkan berkembang sesuai dengan ijtihad para cendekiawan agar sejalan dengan perkembangan sejarah dan tumbuh sebagai kegiatan intelektual manusia (Budy Munawar Rachman, 2006).

Bagi para pemikir politik, politik terkait erat dengan etika. Bedanya jika pemikir Yunani membicarakan keterkaitan itu dalam wilayah filsafat moral, sementara pemikir politik islam mendiskusikan dalam naungan teologi. Ini terlihat bahwa dalam Islam persoalan politik tidak terpisah dengan persoalan agama (Nurcholish Madjid, 1994).

Dalam perspektif Islam, politik dan etika memiliki hubungan yang erat. Islam memandang bahwa seluruh aktivitas manusia, termasuk politik, harus berada dalam koridor nilai-nilai ketuhanan. Oleh sebab itu, teologi Islam memberikan dasar normatif bagi penyelenggaraan kekuasaan agar senantiasa berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan.

Konsep etika politik dalam teologi Islam berakar pada ajaran tauhid yang menempatkan Allah sebagai sumber segala kekuasaan. Manusia hanya bertindak sebagai khalifah yang bertanggung jawab mengelola kehidupan sesuai dengan ketentuan-Nya. Prinsip ini melahirkan berbagai nilai politik seperti amanah, keadilan, musyawarah, dan tanggung jawab sosial.

Di era modern, ketika sistem politik menghadapi berbagai tantangan global, kajian mengenai relevansi etika politik Islam menjadi semakin penting. Nilai-nilai yang terkandung dalam teologi Islam dapat menjadi alternatif dalam membangun budaya politik yang berintegritas dan berkeadilan.

B. RUMUSAN MASALAH



Untuk lebih mendapatkan fokus dari apa yang akan di teliti, pertanyaan penelitian penting untuk dibatasi. Karena itu penulis membatasi pertanyaan penelitian ini dalam tiga poin, yaitu:

1. Bagaimana sejarah kemunculan politik dalam teologi islam?
2. Bagaimana konsep etika politik dalam teologi islam?
3. Apa saja dasar dan prinsip etika politik dalam teologi islam?
4. Bagaimana relevansi etika politik dalam teologi islam?

C. LANDASAN TEORI

Konsep adalah rancangan, ide atau suatu pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa Konkrit ataupun gambaran mental dari objek, proses ataupun yang ada diluar bahsa yang digunakan oleh akal budi untuk memahami hal-hal lain.

Etika politik adalah kumpulan atas nilai yang berkenaan dengan ahklak, ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk. Etika adalah suatu ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran tertentu atau bagaimana kita harus mengambil sikap yang bertanggung jawab berhadapan dengan berbagai ajaran moral.

Politik yaitu pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan seperti tentang sistem pemerintahan dan dasar pemerintahan. Etika politik mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia sebagai manusia dan bukan hanya sebagai warga negara terhadap warga negara hukum yang berlaku.

Secara bahasa, kata teologi berasal dari bahasa Yunani, yang terdiri dari dua kata yakni theos dan logos. Theos dalam bahasa Yunani berarti Tuhan sedangkan logos

berarti ilmu, wacana atau kata. Dengan demikian, teologi bisa dimaknai sebagai ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan ketuhanan. Dalam buku Teologi Islam, Harun Nasution mengatakan bahwa teologi adalah ilmu yang membahas ajaran-ajaran dasar dari suatu agama, sebagaimana manusia ingin menyelami seluk beluk agamanya secara mendalam.

D. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sejarah kemunculan politik dalam teologi islam.
2. Untuk mengetahui konsep etika politik dalam teologi islam.
3. Untuk mengetahui dasar dan prinsip dalam teologi islam.
4. Untuk menganalisa relevansi etika politik dalam teologi islam.

Berdasarkan tujuan dari penelitian di atas, penulis berharap agar hasil dari penelitian ini menjadi salah satu sumbangan pemikiran bagi para peneliti yang menfokuskan minat kajiannya pada isu-isu terkait etika politik dalam teologi islam. Adapun untuk kegunaan penelitian adalah:

1. Diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan yang berkaitan dengan konsep etika politik dalam teologi islam
2. Menjadi sumbangan pemikiran dan menambah bagi para peneliti lain.

E. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu



dengan cara meneliti, membaca dan memahami buku-buku yang berkenaan dengan judul penelitian tersebut. Penelitian ini tergolong penelitian deskriptif dengan melalui pendekatan kualitatif.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normative dan sosio-historis, yang dimaksud dengan pendekatan normative disini adalah suatu usaha untuk menjelaskan pendapat-pendapat dan pemikiran yang dihasilkan oleh suatu sumber tersebut. Pendekatan sosio-historis adalah pendekatan bahwa setiap produk pemikiran pada dasarnya hasil interaksi dengan lingkungan sosio kultural yang mengitari.

3. Sumber Data

Penulis menggunakan dua jenis sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah Karya-karya yang ditulis berkenaan dengan yang diteliti. Sumber data sekunder adalah literatur yang berupa buku-buku baik dalam edisi cetak maupun internet dan tulisan-tulisan lain yang didalamnya terdapat uraian etika politik.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan mengumpulkan kepustakaan, menelusuri karya-karya mengenai topik yang diteliti.

5. Metode Analisis Data

Penulis dalam penelitian ini menganalisis data menggunakan analisis isi (*content analysis*) atau analisis tekstual dengan metode

interpretasi. Metode analisis ini merupakan metode yang digunakan untuk mengungkapkan isi sebuah buku atau pemikiran seseorang dengan menggambarkan situasi dan masyarakat pada waktu pemikiran tersebut dihasilkan dalam bentuk tulisan (Imam Prayogo dan Tabrani, 2003). Metode analisis interpretasi yaitu sebagai upaya tercapainya pemahaman yang benar terhadap fakta, data, dan gejala (Syahrin Harahap, 2011).

F. PEMBAHASAN

1. Sejarah Kemunculan Politik Dalam Teologi Islam

Membahas teologi islam dari aspek agama, politik maupun disiplin kelimuan memang sangat menarik. Teologi Islam yang notabennya berkuat pada pembahasan agama yang suci ternyata tidak terlepas dari jeratan politik yang penuh tipu muslihat dan dosa. Agak aneh memang ketika teologi Islam muncul bukan karena wahyu, tetapi karena politik dan kekuasaan, inilah yang diherankan oleh Harun Nasution dalam bukunya Teologi Islam (Harun Nasution, 1986).

Tepatnya ketika Muawiyah tidak menerima pengangkatan Ali sebagai khalifah. Muawiyah menduga Ali ikut ambil bagian dalam kematian Usman bin Affan. Sebagai anggota keluarga, tentu Muawiyah tidak menerima hal ini, maka dari itu ia menuntut Ali untuk menyelidiki kematian Usman terlebih dahulu dan menemukan pembunuhnya, sebelum ia diangkat menjadi khalifah. Tetapi permintaan tersebut ditolak oleh pihak Ali, dan terjadilah peperangan antar keduanya yang dalam sejarah dikenal



dengan perang Shiffin. Sebenarnya perseteruan tersebut dimenangkan oleh pihak Ali bin Abi Thalib. Tetapi sewaktu pasukan Muawiyah terdesak dan mulai tampak tanda-tanda kekalahan, Muawiyah meminta salah satu utusannya untuk meletakkan al-Quran diatas tombak, kemudian menunjukkannya kepada pasukan Ali dan meminta perdamaian atau tahkim. Permintaan tersebut dipenuhi oleh Ali dengan mengutus Abu Musa al-As'ari untuk melakukan perundingan tersebut, sedangkan dari Muawiyah mereka mengutus Amru bin Ash. Dalam perundingan tersebut kedua belah pihak diminta untuk melepas jabatannya sebagai kepala negara, kemudian dipilih kembali secara demokratis dan Adil. Sayangnya pelepasan jabatan tersebut hanya dilakukan oleh kelompok Ali, sedangkan dari Muawiyah justru malah melakukan hal sebaliknya. Sewaktu Abu Musa al-As'ari mengumumkan pelepasan jabatan Ali sebagai kepala negara, justru dengan licik Amru bin Ash mengangkat Muawiyah menjadi khalifah umat Islam menggantikan Ali.

Persoalan kekuasaan dan khilafah inilah yang menyebabkan umat Islam terpecah menjadi beberapa golongan, sekaligus menjadi cikal bakal munculnya aliran teologi dalam Islam. Muawiyah yang tidak ingin kehilangan jabatan setelah merebutnya dari Ali dengan susah payah, terus berusaha mempertahankan kekuasaannya dengan membuat hadis palsu tentang keutamaan sahabat (selain Ali dan keluarga Bani Hasyim) terutama Usman.

Pemerintah Umayyah juga menggunakan paham Jabariyyah untuk mengukuhkan legitimasinya. Paham

Jabariyyah meyakini bahwa semua pekerjaan manusia berasal dari Tuhan, sehingga dengan itu Muawiyah beralasan bahwa tindakannya memberontak Ali bukan berasal dari dirinya tetapi semua itu adalah takdir yang memang dikehendaki Tuhan. Dengan paham tersebut Muawiyah berusaha meredam semua pemberontakan yang ingin menuntut dirinya, terutama dari umat Syi'ah. Pun Syi'ah, mereka juga banyak membuat hadis palsu tentang keutamaan Ali dan keluarganya. Bahkan Syi'ah yang ekstrim, mereka sampai menuhankan Ali bin Abi Thalib (Ahmad Amin, 1997).

Dari sini kita bisa melihat bagaimana politik bisa mengintervensi agama, kemudian mempengaruhi dan membentuk doktrin-doktrin keagamaan. Dengan melihat kenyataan sejarah, tentu ini bisa menjadi kajian dan renungan, apakah kita juga akan terus ikut berpolimik dalam pertentangan aliran dan madzhab seperti orang-orang terdahulu, atautkah kita bersikap saling menghargai dan menghormati terhadap perbedaan tersebut. Sebagaimana yang ada dalam sejarah, bahwa perbedaan yang terjadi antar madzhab agama tidak terlepas dari jeratan politik dan perebutan kekuasaan, bukan agama. Dalam politik, agama seringkali hanya digunakan untuk melegitimasi dan melanggengkan kekuasaan mereka.

Ahmad Amin dalam bukunya Fajr al-Islam mengatakan, bahwa sebenarnya kelompok-kelompok Islam pertama seperti Khawarij, Syi'ah dan Murjiah semula merupakan golongan politik yang muncul akibat persoalan Khilafah. Tetapi kemudian mereka membawa permasalahan politik tersebut pada permasalahan agama (Ahmad Amin, 1997). Senada dengan hal diatas, Harun Nasution juga mengatakan



bahwa mereka pada mulanya membahas persoalan-persoalan politik, tetapi persoalan tersebut dengan cepat meningkat ke persoalan teologi (Harun Nasution, 1986). Permasalahan khilafah memang merupakan salah satu permasalahan inti dalam teologi Islam.

2. Konsep Etika Politik Dalam Teologi Islam

Kata etika berasal dari bahasa Yunani yaitu *ethos* yang berarti dalam bentuk tunggal; tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kebiasaan adat, watak, perasaan, sikap dan cara berpikir. Dalam bentuk jamak '*ta etha*' yang artinya adat kebiasaan (K. Bretens, 1994).

Etika adalah ilmu tentang adat kebiasaan untuk mengatur tingkah laku manusia. Baik atau buruk perbuatan manusia dapat dilihat dari persesuaian dengan adat-istiadat yang umum berlaku di lingkungan dan kesatuan sosial tertentu. Secara etimologis, etika merupakan sistem prinsip-prinsip moral (A.S. Homby, 1974).

Kata lain dari etika adalah *akhlak*, berasal dari bahasa Arab yaitu *khalaqah* yang berarti menciptakan, dalam bentuk jamak *khuluq* yang berarti budi pekerti, perangai, dan tingkah laku. Akhlak bukan hanya tata aturan atau norma perilaku yang mengatur hubungan sesama manusia, namun mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan alam semesta (Yunahar Ilyas, 2001).

Politik berasal dari bahasa Yunani Kuno, yaitu 'politikos' yang artinya kepunyaan negara. Politik merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dalam suatu sistem yang disebut negara. Politik juga berasal dari kata '*polis*' yang berarti 'negara kota'.

Politik berarti adanya hubungan antara manusia yang hidup bersama, dalam hubungan tersebut timbul aturan kewenangan dan kekuasaan bagi pelaku. Oleh karena itu pelaku harus bijaksana dan cerdas dalam menentukan dan melaksanakan tujuan-tujuan politik (Inu Kencana Syafi'i, 1997).

Istilah politik dalam perspektif Islam, menurut Pulungan adalah kata politik dalam bahasa Arab disebut *siyasat*, yaitu berasal dari kata *sasa*. Kata ini dalam kamus *al-Munjid* dan *Lisan Al-Arab* berarti mengatur, mengurus, dan memerintah. *Siyasat* bisa juga berarti pemerintahan dan politik atau membuat kebijaksanaan. Jadi, *siyasa* menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijakan, pemerintahan dan politik. Artinya mengatur mengurus, dan membuat kebijakan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan adalah *siyasa* (Beddy Iriawan Maksudi).

Etika politik adalah prinsip atau ajaran nilai sosial politik Islam, seperti persamaan (*musawah*), persaudaraan (*ukhuwah*), musyawarah (*syura*), ketebukaan, petanggungjawaban (*mas'uliyah*), amanah perlu di tafsir secara kreatif dan dilembagakan secara modern. Etika politik diperlukan dalam menggerakkan kontekstualisasi nilai-nilai Islam dalam arti operasional ajaran Islam (Amien Rais, 1999).

Dalam teologi Islam, kekuasaan dipandang sebagai amanah (titipan) dari Allah, bukan hak mutlak penguasa. Manusia berperan sebagai khalifah di bumi yang bertugas mewujudkan kemaslahatan dan keadilan. Konsep etika politik dalam teologi Islam adalah seperangkat nilai moral dan prinsip keagamaan yang mengatur bagaimana kekuasaan diperoleh, dijalankan, dan dipertanggungjawabkan



menurut ajaran Islam.

Etika politik dalam teologi Islam menempatkan kekuasaan sebagai amanah yang harus dijalankan berdasarkan nilai-nilai tauhid, keadilan, musyawarah, persamaan, dan kemaslahatan. Etika politik tidak hanya berbicara tentang efektivitas pemerintahan, tetapi juga tentang keadilan, amanah, dan tanggung jawab di hadapan Allah.

3. Dasar dan Prinsip Etika Politik Dalam Teologi Islam

Dalam teologi Islam, kekuasaan dipandang sebagai amanah (titipan) dari Allah, bukan hak mutlak penguasa. Manusia berperan sebagai khalifah di bumi yang bertugas mewujudkan kemaslahatan dan keadilan. Beberapa landasan dasar utamanya:

- a. Tauhid: Pengakuan bahwa kedaulatan tertinggi berada pada Allah. Kekuasaan manusia harus tunduk pada nilai-nilai ilahi.
- b. Khilafah: Manusia diberi tanggung jawab mengelola kehidupan sosial dan politik secara adil.
- c. Amanah: Jabatan dan kekuasaan merupakan tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan.
- d. Mas'uliyah (akuntabilitas): Setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.

Prinsip-prinsip etika politik dalam teologi islam, meliputi:

- a. Keadilan (al-'adl)
Keadilan merupakan prinsip paling mendasar dalam politik Islam. Penguasa wajib memperlakukan semua warga secara adil tanpa

diskriminasi.

- b. Musyawarah (syura)
Keputusan politik idealnya diambil melalui konsultasi dan partisipasi masyarakat, bukan secara otoriter.
- c. Persamaan (al-musawah)
Semua manusia memiliki martabat yang sama di hadapan Allah. Perbedaan suku, ras, atau status sosial tidak boleh menjadi dasar perlakuan yang tidak adil.
- d. Kemaslahatan (masalahah)
Kebijakan publik harus bertujuan menghasilkan manfaat dan mencegah kerusakan bagi masyarakat.
- e. Kejujuran dan Integritas
Pemimpin dituntut memiliki sifat jujur (*shidq*), dapat dipercaya (*amanah*), dan konsisten dalam menjalankan tugas.

4. Relevansi Etika Politik Dalam Teologi Islam

Sebagai seorang muslim dan sebagai negara yang memiliki jumlah penduduk pemeluk agama Islam terbesar di dunia, maka wajar apabila kita melihat segala sesuatu di negara ini dari sudut pandang Islam. Oleh karena itu, marilah kita mengkaji ulang konsep pemilihan presiden sebagai kepala negara dan pemimpin masyarakat, apakah telah sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Islam, atau malah sebaliknya, melenceng jauh dari apa yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para Khalifah.

Pada dasarnya dalam konsep pemerintahan Islam, semua anggota masyarakat harus ikut berperan serta dalam memilih khalifah. Tetapi dalam perkembangan sejarah, seiring dengan meluasnya wilayah Islam,



mengumpulkan semua orang dalam satu waktu dan dalam satu tempat untuk bermusyawarah menjadi hal yang tidak mungkin. Oleh karena itu, seluruh anggota masyarakat diwajibkan untuk memilih wakil mereka dalam memilih khalifah sebagai pemimpin (Muhammad Rasyid Ridho, 2005).

Wakil dari umat ini dinamakan dengan Ahlul Hal wal Aqd. Wakil-wakil rakyat ini terdiri dari utusan dari berbagai golongan masyarakat dan harus memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi (Al-Mawardi, 1989).

Syarat-syarat tersebut antara lain adil, mengenal dengan baik para calon khalifah yang akan dipilih, dan kemampuan serta kebijaksanaan mereka dalam mengambil keputusan dan menentukan siapa yang pantas untuk menjadi pemimpin umat.

Dalam musyawarah pemilihan khalifah, para anggota Ahlul Hal wal Aqd memilih khalifah dengan dengan proses yang panjang. Para wakil rakyat ini harus mencari tahu dan mengenal betul setiap calon khalifah, kemudian memilah dan memilih mana yang tepat untuk memimpin dan sesuai dengan kebutuhan negara pada waktu itu. Misalnya ketika negara mengalami masa peperangan, maka yang lebih diutamakan adalah pemimpin yang kuat dan berani, walaupun memiliki kekurangan di bidang lain (Ibnu Taimiyah, 1403).

Begitu pula dalam memilih wakil, para anggota Ahlul Hal wal Aqd harus memilih wakil yang dapat mendukung dan menutupi kekurangan khalifah yang dipilih, sehingga terciptalah pemerintahan yang seimbang. Apabila terdapat beberapa calon yang mempunyai kemampuan yang

sama dan dianggap pantas, barulah dilakukan pemilihan dengan jalan voting atau pengambilan keputusan dengan suara terbanyak (Ibnu Taimiyah, 1403).

Etika politik dalam teologi Islam sangat relevan karena menjembatani antara keyakinan (akidah), nilai moral (akhlak), dan praktik kekuasaan (siyasah). Dalam tradisi Islam, politik tidak dipahami sebagai ruang yang netral nilai, tetapi sebagai arena yang harus tunduk pada prinsip etis-religius. Berikut beberapa poin utama relevansi etika politik dalam teologi islam, yaitu:

- a. Politik sebagai bagian dari amanah moral

Dalam teologi Islam, manusia dipandang sebagai khalifah (pemimpin/pengelola bumi). Ini membuat kekuasaan politik bukan sekadar alat dominasi, tetapi amanah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan.

- b. Keadilan sebagai prinsip teologis

Konsep 'adl (keadilan) dalam Islam bukan hanya nilai sosial, tetapi juga perintah ilahi. Pemerintahan yang tidak adil dianggap menyimpang secara teologis, bukan hanya gagal secara administratif. Karena itu, etika politik dalam Islam menuntut keadilan hukum, perlindungan hak manusia, penolakan terhadap tirani.

- c. Kekuasaan dibatasi oleh syariah dan nilai akhlak

Dalam teologi politik Islam klasik, kekuasaan tidak absolut yang dibatasi oleh prinsip syariah, akhlak (etika moral), kemaslahatan umat (maslahah). Hal tersebut menunjukkan bahwa legitimasi politik tidak hanya



berasal dari kekuatan atau suara, tetapi juga dari kesesuaian dengan nilai etis-religius.

- d. Tanggung jawab pemimpin (khilafah)

Dalam banyak pemikiran teologi Islam, pemimpin ideal adalah adil, amanah, menjaga kemaslahatan umat, tidak zalim. Hal tersebut membuat etika politik menjadi standar evaluasi kepemimpinan, bukan sekadar harapan moral.

- e. Koreksi terhadap penyalahgunaan agama dalam politik

Relevansi modern yang penting adalah bahwa etika politik dalam teologi Islam juga berfungsi sebagai kritik terhadap politisasi agama untuk kekuasaan, korupsi yang dibenarkan secara simbolik religius, otoritarianisme yang mengatasnamakan Tuhan. Dengan kata lain, teologi Islam bisa menjadi alat kontrol moral terhadap kekuasaan.

- f. Relevansi dalam konteks modern

Dalam negara modern, etika politik Islam tetap relevan untuk membangun integritas pejabat publik, mendorong transparansi dan anti-korupsi, memperkuat demokrasi yang berkeadilan, menjaga harmoni antara agama dan negara. Namun, penerapannya juga perlu dialog dengan sistem politik modern agar tidak berubah menjadi formalistik atau eksklusif.

G. PENUTUP

Kesimpulan

Relevansi konsep Etika politik dalam teologi islam, meliputi; *Pertama*, Sejarah kemunculan politik dalam yaitu Teologi Islam yang notabennya berkuat pada pembahasan agama yang suci ternyata tidak terlepas dari jeratan politik yang penuh tipu muslihat dan dosa. Teologi Islam muncul bukan karena wahyu, tetapi karena politik dan kekuasaan. Di mulai saat Muawiyah tidak menerima pengangkatan Ali sebagai khalifah dan terjadilah peperangan antar keduanya yang dalam sejarah dikenal dengan perang Shiffin. Sebenarnya perseteruan tersebut dimenangkan oleh pihak Ali bin Abi Thalib. Tetapi sewaktu pasukan Muawiyah terdesak dan mulai tampak tanda-tanda kekalahan, Muawiyah meminta salah satu utusannya untuk meletakkan al-Quran diatas tombak, kemudian menunjukkannya kepada pasukan Ali dan meminta perdamaian atau tahkim. Sewaktu Abu Musa al-Asy'ri mengumumkan pelepasan jabatan Ali sebagai kepala negara, justru dengan licik Amru bin Ash mengangkat Muawiyah menjadi khalifah umat Islam menggantikan Ali. Persoalan kekuasaan dan khilafah inilah yang menyebabkan umat Islam terpecah menjadi beberapa golongan, sekaligus menjadi cikal bakal munculnya aliran teologi dalam Islam.

Kedua, Konsep etika politik dalam teologi Islam adalah seperangkat nilai moral dan prinsip keagamaan yang mengatur bagaimana kekuasaan diperoleh, dijalankan, dan dipertanggungjawabkan menurut ajaran Islam. Etika politik dalam teologi Islam menempatkan kekuasaan sebagai amanah yang harus dijalankan berdasarkan nilai-nilai



tauhid, keadilan, musyawarah, persamaan, dan kemaslahatan. Etika politik tidak hanya berbicara tentang efektivitas pemerintahan, tetapi juga tentang keadilan, amanah, dan tanggung jawab di hadapan Allah.

Ketiga, Landasan dasar etika politik dalam teologi islam, yaitu Tauhid, Khilafah, Amanah, Mas'uliyah (akuntabilitas). Prinsip-prinsip etika politik dalam teologi islam, yaitu Keadilan (al-'adl), Musyawarah (syura), Persamaan (al-musawah), Kemaslahatan (maslahah), Kejujuran dan Integritas.

Keempat, Etika politik dalam teologi Islam sangat relevan karena menjembatani antara keyakinan (akidah), nilai moral (akhlak), dan praktik kekuasaan (siyasah). Dalam tradisi Islam, politik tidak dipahami sebagai ruang yang netral nilai, tetapi sebagai arena yang harus tunduk pada prinsip etis-religius. Berikut beberapa poin utama relevansi etika politik dalam teologi islam, yaitu: Politik sebagai bagian dari amanah moral, Keadilan sebagai prinsip teologis, Kekuasaan dibatasi oleh syariah dan nilai akhlak, Tanggung jawab pemimpin (khilafah), Koreksi terhadap penyalahgunaan agama dalam politik, Relevansi dalam konteks modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Amin, *Fajru al-Islâm*, (Kairo: Maktabah al-Usrah, 1997).
- Amien Rais, *Kearifan Dalam Ketegasan*, (Yogyakarta: Bilgraf, 1999).
- Al-Mawardi, *al-Ahkam as-Sulthaniyah wa al-Wilayat ad-Diniyah*, (Kuwait: Daar Ibnu Qutaibah, 1989).
- A.S. Hornby, *Oford Advanced learner's Dictionary of Current English*, (London: The English Leanguage Book Society and Oxford University Press, 1974).
- Beddy Iriawan Maksudi, *Sistem Politik Indonesia*.
- Budy Munawar Rachman, *Ensiklopedi Nurcholish Madjid*, (Jakarta: Mizan, 2006).
- Harun Nasution, *Teologi Islam*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, Cet 5, 1986).
- Ibnu Taimiyah, *as-Siyasah asy-Syar'iah fi Islahir Raa'i war Raa'iyah*, (Beirut: Darul Ifqaq, 1403).
- Imam Prayogo dan Tabrani, *Metodologi Penelitian Sosial dan Agama*, (Bandung: Rosda Karya, 2003).
- Inu Kencana Syafi'i, *Ilmu Politik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997).
- K. Bretens, *Etika*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994).
- Muhammad Rasyid Ridho, *Tafsir Al-Qur'an al-Hakim al-Masyhur bi Tafsir al-Manar*, jilid ke-5, (Beirut: Daar al-Kutub, 2005).
- Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kristis Tentang Masalah Keimanan, kemanusiaan, dan Kemandirian*, (Jakarta: Paramadina, 2000).
- Nurcholish Madjid, *Agama dan Negara dalam Islam: Telaah atas Fiqh Siyasy Sunni*, dalam Budy Munawar Rachmad (editor), *Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah*, (Jakarta: Paramadina, 1994).
- Syahrin Harahap, *Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam*, (Jakarta: Prenada, 2011).
- Yahya A. Muhaimin, *Etika Pembangunan Politik*, dalam Nourouzzaman Shiddiqi dkk, *Etika Pembangunan Dalam*



Pemikiran Islam Indonesia, Cet. 1,
(Jakarta: CV. Rajawali, 1986).

Yunahar Ilyas, Kuliah Akhlak,
(Yogyakarta:LPPI, 2001).